

## Pola Ketimpangan Pendapatan Antarkabupaten di Aceh: Pendekatan Data SUSENAS

Helmi Noviar <sup>1\*</sup>, Saiful Badli <sup>2</sup>, Zulbaidi <sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Ekonomi Pembangunan, Universitas Teuku Umar, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [helminoviar@utu.ac.id](mailto:helminoviar@utu.ac.id)

**Abstract.** This study analyzes the patterns and dynamics of income inequality across districts and municipalities in Aceh Province during the 2022–2024 period using data from the National Socio-Economic Survey (Susenas) published by Statistics Indonesia (BPS). A descriptive-comparative approach was employed with the Gini Ratio as the main indicator to examine spatial variations and inequality trends between urban and rural areas. The results show that Aceh's Gini Ratio declined from 0.296 in 2022 to 0.294 in 2024, indicating a modest improvement in income distribution. The reduction in inequality mainly occurred in rural areas, while urban regions experienced a slight increase due to the concentration of economic activities among higher-income groups. Banda Aceh and Lhokseumawe recorded the highest inequality levels, whereas Aceh Tengah and Bireuen demonstrated relatively strong income equality. Overall, Aceh remains one of the provinces with low-income inequality in Indonesia but still faces challenges of structural disparities across regions. The findings highlight the need to shift policy orientation from redistributive equality toward productivity-based equality through regional economic integration, empowerment of micro and small enterprises, and the development of inclusive economic sectors to achieve equitable and sustainable growth..

**Keywords:** equity, Gini ratio, income inequality, MSMEs, urban–rural disparity.

**Abstrak.** Penelitian ini menganalisis pola dan dinamika ketimpangan pendapatan antarkabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2022–2024 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Analisis dilakukan melalui pendekatan deskriptif-komparatif menggunakan indikator Gini Ratio untuk menilai variasi spasial dan arah perubahan ketimpangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Gini Ratio Provinsi Aceh menurun dari 0,296 pada tahun 2022 menjadi 0,294 pada tahun 2024, menandakan adanya perbaikan pemerataan pendapatan meskipun dalam skala moderat. Penurunan ketimpangan terutama terjadi di wilayah perdesaan, sedangkan di perkotaan, ketimpangan cenderung meningkat akibat konsentrasi kegiatan ekonomi pada kelompok pendapatan menengah atas. Kota Banda Aceh dan Lhokseumawe tercatat memiliki ketimpangan tertinggi, sementara Aceh Tengah dan Bireuen menunjukkan pemerataan yang relatif kuat. Secara keseluruhan, Aceh termasuk provinsi dengan tingkat ketimpangan rendah di Indonesia, namun masih menghadapi tantangan pemerataan struktural antarwilayah. Temuan ini menegaskan pentingnya pergeseran kebijakan dari pemerataan berbasis redistribusi menuju pemerataan berbasis produktivitas, melalui integrasi ekonomi wilayah, penguatan UMKM, dan pembangunan sektor-sektor inklusif untuk mencapai pertumbuhan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Gini Ratio, ketimpangan pendapatan, pemerataan, perkotaan–perdesaan, UMKM.

### 1. LATAR BELAKANG

Ketimpangan pendapatan merupakan isu mendasar dalam ekonomi pembangunan yang terus menjadi perhatian, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam konteks Indonesia, perdebatan tentang pemerataan hasil pembangunan telah menjadi bagian integral dari agenda sosial-ekonomi sejak masa Orde Baru hingga kini. Peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) sering kali tidak berbanding lurus dengan pemerataan kesejahteraan, karena pertumbuhan ekonomi cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu dan pada kelompok pendapatan menengah atas (Aisyah et al., 2023). Akibatnya, meskipun angka kemiskinan mengalami

penurunan, kesejangan sosial tetap menjadi tantangan yang menghambat tercapainya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Provinsi Aceh menghadirkan studi kasus yang menarik dalam pembahasan ketimpangan regional di Indonesia. Dengan statusnya sebagai daerah dengan Dana Otonomi Khusus (Otsus) sejak 2008, Aceh menerima transfer fiskal yang signifikan dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Namun, meskipun kemiskinan menurun secara gradual, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ketimpangan antarwilayah di Aceh masih bertahan, bahkan mengalami variasi yang cukup lebar antar kabupaten/kota. Pada Maret 2024, tingkat kemiskinan di Aceh sebesar 14,23 persen—lebih tinggi dibanding rata-rata nasional—sementara nilai Gini Ratio tercatat 0,294, yang menandakan ketimpangan tergolong rendah tetapi belum seragam di seluruh daerah.

Disparitas pembangunan antarkabupaten di Aceh mencerminkan struktur ekonomi yang sangat beragam. Kota Banda Aceh dan Lhokseumawe memiliki basis ekonomi jasa dan perdagangan yang kuat, sementara sebagian besar kabupaten di wilayah tengah dan selatan—seperti Bener Meriah, Gayo Lues, atau Aceh Selatan—masih bergantung pada sektor pertanian tradisional. Perbedaan struktur ekonomi ini menghasilkan variasi dalam pendapatan rumah tangga dan daya beli masyarakat. Kabupaten dengan tingkat urbanisasi tinggi umumnya menikmati produktivitas ekonomi yang lebih besar, sementara daerah pedesaan menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses modal, dan peluang kerja non-pertanian. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ketimpangan tidak hanya mencerminkan perbedaan kemampuan ekonomi antarindividu, tetapi juga ketidakseimbangan spasial dalam distribusi sumber daya pembangunan.

Dalam teori ekonomi pembangunan, ketimpangan sering dikaitkan dengan hipotesis Kuznets Curve, yang menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan cenderung meningkat karena peralihan tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern (Maranzano et al., 2022; Sulistyaningrum & Tjahjadi, 2022). Ketimpangan baru akan menurun ketika manfaat pertumbuhan mulai tersebar lebih luas. Namun, pola ini tidak selalu berlaku secara universal, terutama di wilayah seperti Aceh yang mengalami intervensi fiskal besar tetapi masih menghadapi ketimpangan struktural akibat disparitas geografis, kapasitas ekonomi lokal, dan perbedaan dalam efektivitas kebijakan daerah. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika ketimpangan antarwilayah menjadi penting untuk menilai sejauh mana pembangunan Aceh telah benar-benar inklusif.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) memberikan peluang besar untuk mengkaji pola ketimpangan secara empiris. Dengan menggunakan data Susenas Maret 2022, 2023, dan 2024, analisis ini dapat menggambarkan bagaimana distribusi pengeluaran rumah tangga—sebagai proksi pendapatan—berubah di seluruh kabupaten/kota di Aceh dalam tiga tahun terakhir. Pengukuran dilakukan melalui dua pendekatan: pertama, Gini Ratio, yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan secara keseluruhan; dan kedua, Kriteria Bank Dunia, yang menilai porsi pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah terhadap total pengeluaran (Maranzano et al., 2022). Kombinasi kedua ukuran ini tidak hanya menampilkan tingkat ketimpangan, tetapi juga arah perubahannya serta distribusi kesejahteraan di antara kelompok masyarakat.

Ketimpangan pendapatan yang rendah di tingkat provinsi tidak selalu berarti pemerataan yang sesungguhnya terjadi di seluruh kabupaten. Ada kemungkinan bahwa beberapa daerah mengalami ketimpangan yang jauh lebih tinggi dibanding rata-rata, sementara daerah lain relatif lebih merata. Misalnya, wilayah perkotaan di Aceh memperlihatkan peningkatan Gini Ratio menjadi 0,325 pada tahun 2024, menandakan ketimpangan di kota justru melebar, sedangkan di wilayah perdesaan terjadi penurunan ke angka 0,258. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai apakah kebijakan pembangunan daerah telah berhasil menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan wilayah secara proporsional.

Kajian ini berupaya mengisi celah dalam literatur mengenai analisis ketimpangan pendapatan antarwilayah di tingkat provinsi, khususnya di Aceh. Meskipun BPS secara rutin mempublikasikan data kemiskinan dan ketimpangan, kajian akademik yang menelusuri perubahan pola ketimpangan antar kabupaten/kota dalam kurun waktu tertentu masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Aceh selama periode 2022–2024 dengan menggunakan pendekatan data Susenas. Analisis ini diharapkan mampu memberikan pemahaman empiris tentang dinamika distribusi pengeluaran di tingkat regional, sekaligus menilai efektivitas kebijakan otonomi khusus dalam mendorong pemerataan ekonomi.

Dari sisi kontribusi ilmiah, penelitian ini memberikan tiga sumbangan utama. Pertama, secara empiris, studi ini menyajikan pemetaan spasial ketimpangan pendapatan antarkabupaten di Aceh dengan basis data mikro yang representatif, sehingga memperkaya bukti empiris mengenai disparitas regional di Indonesia bagian barat. Kedua, secara metodologis, penelitian ini memadukan pendekatan Gini Ratio dan Kriteria Bank Dunia untuk menghasilkan analisis ketimpangan yang lebih komprehensif antara dimensi vertikal (antar kelompok pendapatan) dan horizontal (antarwilayah). Ketiga, secara kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat

menjadi dasar bagi perumusan strategi pembangunan daerah yang lebih inklusif, khususnya dalam kerangka pasca-Dana Otsus dan peralihan menuju era pembangunan Aceh berbasis pemerataan dan produktivitas lokal.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif komparatif untuk menganalisis variasi dan perubahan ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2022–2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS Maret 2022, 2023, dan 2024, dengan unit analisis sebanyak 23 kabupaten/kota. Variabel utama yang dianalisis adalah pengeluaran per kapita rumah tangga sebagai proksi pendapatan. Ketimpangan diukur menggunakan dua indikator utama:

1. Koefisien Gini (Gini Ratio) untuk menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk. Rumus perhitungan (Muftiyatul Azizah, 2022):

$$G = 1 - \sum(Y_i + Y_{i-1})(X_i - X_{i-1})$$

Nilai Gini 0–0,3 menunjukkan ketimpangan rendah; 0,3–0,5 sedang; dan >0,5 tinggi.

2. Kriteria Bank Dunia, dengan pengelompokan 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% menengah, dan 20% tinggi. Jika porsi pengeluaran 40% terbawah >17%, maka ketimpangan tergolong rendah.

Analisis dilakukan secara dinamis dan komparatif, meliputi:

1. Perbandingan Gini Ratio antar tahun (2022–2024) untuk melihat tren ketimpangan.
2. Analisis spasial antar kabupaten/kota untuk menilai variasi regional (Isard et al., 2017).
3. Perbandingan antara wilayah perkotaan dan perdesaan untuk mengidentifikasi pola distribusi pendapatan.

Data dianalisis secara deskriptif melalui tabel, grafik, dan interpretasi naratif. Validitas dijaga dengan menggunakan data resmi BPS yang konsisten antar tahun dan disesuaikan ke harga konstan agar tidak bias inflasi. Penelitian ini terbatas pada pengukuran ketimpangan berbasis pengeluaran rumah tangga tanpa analisis kausalitas. Namun demikian, hasilnya memberikan gambaran empiris yang akurat mengenai pola ketimpangan pendapatan antarkabupaten di Aceh selama tiga tahun terakhir.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### ***Perkembangan Umum Ketimpangan Pendapatan di Aceh (2022–2024)***

Perkembangan ketimpangan pendapatan di Provinsi Aceh selama periode 2022 hingga 2024 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan sedikit perbaikan menuju distribusi pendapatan yang lebih merata. Berdasarkan hasil olahan data *Survei Sosial Ekonomi Nasional* (Susenas) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), nilai Gini Ratio Aceh menurun dari 0,296 pada tahun 2022 menjadi 0,294 pada tahun 2024. Penurunan sebesar 0,002 poin ini menggambarkan adanya proses pemerataan yang perlahan namun konsisten di tengah berbagai dinamika sosial dan ekonomi daerah. Dengan angka Gini Ratio di bawah 0,3, kondisi ketimpangan di Aceh tergolong rendah menurut klasifikasi BPS dan Bank Dunia.

Kestabilan dan penurunan kecil dalam nilai Gini Ratio tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerataan yang dijalankan pemerintah daerah dan pusat memiliki efek positif, terutama melalui program sosial dan transfer fiskal seperti Dana Otonomi Khusus (Otsus), bantuan sosial, serta program pemberdayaan ekonomi desa. Instrumen-instrumen kebijakan ini membantu memperkuat daya beli rumah tangga miskin dan mendorong peningkatan pendapatan kelompok bawah. Namun, sifat perbaikannya yang masih moderat menunjukkan bahwa pemerataan tersebut belum bersumber dari transformasi struktural ekonomi yang mendalam, melainkan masih ditopang oleh mekanisme redistribusi sosial dan bantuan fiskal.

Selama periode yang sama, struktur ketimpangan antarwilayah di Aceh tetap asimetris. Daerah perkotaan mengalami kecenderungan peningkatan ketimpangan, sedangkan wilayah perdesaan justru menunjukkan perbaikan. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi di perkotaan belum sepenuhnya inklusif. Pertumbuhan sektor jasa, perdagangan, dan aktivitas ekonomi digital yang lebih cepat di kota cenderung dinikmati oleh kelompok berpendapatan menengah atas, sementara pekerja sektor informal masih berhadapan dengan fluktuasi pendapatan. Sebaliknya, peningkatan produktivitas pertanian dan efektivitas program-program pembangunan desa tampaknya berperan penting dalam menekan ketimpangan di wilayah rural.

Tren ini juga terlihat dari distribusi pengeluaran antar kelompok penduduk. Kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terbawah mengalami peningkatan porsi pengeluaran dari 22,10 persen pada 2022 menjadi 22,45 persen pada 2024, yang menandakan adanya perbaikan pemerataan kesejahteraan. Sementara kelompok 20 persen penduduk teratas justru mengalami sedikit penurunan porsi pengeluaran dari 40,05 persen menjadi 39,95 persen. Pergeseran kecil ini memperlihatkan adanya redistribusi pendapatan ke arah kelompok menengah dan bawah, meskipun dalam skala yang masih terbatas.

Selain itu, indikator kemiskinan juga menunjukkan perbaikan yang sejalan dengan penurunan ketimpangan. Persentase penduduk miskin di Aceh menurun dari 14,64 persen pada 2022 menjadi 14,23 persen pada 2024, disertai penurunan jumlah penduduk miskin sekitar 23 ribu orang. Penurunan ini memperkuat dugaan bahwa proses pemerataan pendapatan turut menurunkan tingkat kemiskinan, sekaligus mencerminkan keberhasilan kebijakan sosial dalam menjaga daya beli kelompok rentan. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan Aceh masih berada di atas rata-rata nasional, yang berarti potensi ketimpangan struktural antar sektor dan wilayah masih perlu diwaspadai.

Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Aceh meningkat dari Rp1.165.000 menjadi Rp1.275.000 per bulan dalam tiga tahun terakhir. Kenaikan ini menggambarkan adanya pertumbuhan ekonomi di tingkat rumah tangga, namun tetap perlu diinterpretasikan hati-hati mengingat pengaruh inflasi dan perbedaan harga antar wilayah. Kenaikan pengeluaran di kelompok menengah bawah menunjukkan perbaikan konsumsi dasar, tetapi peningkatan di kelompok atas masih lebih tinggi secara nominal, yang dapat menjelaskan mengapa penurunan Gini Ratio terjadi dalam skala kecil.

Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan di Aceh cenderung menurun, meskipun dalam laju yang lambat dan tidak merata antar wilayah. Arah perubahan ini menegaskan adanya peningkatan kesejahteraan di kelompok bawah dan perbaikan pemerataan di pedesaan, tetapi juga menyoroti tantangan pemerataan di wilayah perkotaan yang lebih kompleks. Dengan Gini Ratio yang stabil di bawah 0,3, Aceh telah menunjukkan fondasi pemerataan ekonomi yang cukup kuat. Namun, untuk mempercepat penurunan ketimpangan, dibutuhkan transformasi struktural yang mendorong pertumbuhan produktif dan inklusif di sektor-sektor strategis, khususnya industri kecil, ekonomi digital, dan jasa modern—agar hasil pembangunan tidak hanya dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat perkotaan, tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat Aceh.

**Tabel 1.** Statistik Deskriptif Ketimpangan Pendapatan Provinsi Aceh, 2022–2024.

Variabel	2022	2023	2024	Rata-rata	Perubahan
				(2022–2024)	2022–2024
Gini Ratio (Provinsi Aceh)	0,296	0,296	0,294	0,295	↓ 0,002
Gini Ratio Perkotaan	0,318	0,318	0,325	0,320	↑ 0,007
Gini Ratio Perdesaan	0,265	0,265	0,258	0,263	↓ 0,007

Porsi 40% Penduduk	22,10	22,26	22,45	22,27	↑ 0,35
Terbawah (%)					
Porsi 40% Penduduk	37,85	37,70	37,60	37,72	↓ 0,25
Menengah (%)					
Porsi 20% Penduduk	40,05	40,04	39,95	40,01	↓ 0,10
Teratas (%)					
Jumlah Penduduk	0,834	0,822	0,811	0,822	↓ 0,023
Miskin (juta orang)					
Persentase Penduduk	14,64	14,45	14,23	14,44	↓ 0,41
Miskin (%)					
Rata-rata	1.165.000	1.220.000	1.275.000	1.220.000	↑ 110.000
Pengeluaran per					
Kapita (Rp/bulan)					

Sumber: Olahan data *Susenas* BPS Provinsi Aceh, 2022–2024.

Keterangan: ↑ = meningkat; ↓ = menurun.

Tabel statistik deskriptif menunjukkan bahwa kondisi ketimpangan pendapatan di Provinsi Aceh selama periode 2022–2024 berada dalam kategori rendah dan stabil, dengan perbaikan kecil dari tahun ke tahun. Nilai Gini Ratio provinsi menurun dari 0,296 pada 2022 menjadi 0,294 pada 2024, mengindikasikan adanya perbaikan distribusi pendapatan walaupun dengan laju yang relatif lambat. Penurunan sebesar 0,002 poin menunjukkan bahwa kebijakan sosial dan ekonomi di Aceh mulai menunjukkan hasil dalam menekan ketimpangan, meskipun efeknya belum merata di seluruh wilayah kabupaten/kota.

Jika dilihat berdasarkan karakteristik wilayah, perbedaan yang cukup mencolok tampak antara daerah perkotaan dan perdesaan. Nilai Gini Ratio perkotaan meningkat dari 0,318 menjadi 0,325, sementara perdesaan justru menurun dari 0,265 menjadi 0,258. Artinya, dalam periode yang sama, pemerataan ekonomi di desa semakin membaik, sedangkan ketimpangan di kota sedikit melebar. Kecenderungan ini menggambarkan bahwa masyarakat perkotaan di Aceh mengalami peningkatan pendapatan yang tidak merata antar kelompok, terutama akibat perbedaan akses terhadap pekerjaan formal, usaha modern, dan sumber daya produktif. Sebaliknya, pendapatan di wilayah pedesaan meningkat lebih seragam, didukung oleh program bantuan sosial, peningkatan produktivitas pertanian, serta aktivitas ekonomi lokal berbasis desa.

Dari sisi distribusi pengeluaran menurut Kriteria Bank Dunia, terlihat bahwa kelompok 40 persen penduduk terbawah mengalami peningkatan porsi pengeluaran dari 22,10 persen pada 2022 menjadi 22,45 persen pada 2024. Kenaikan ini menandakan distribusi pendapatan yang semakin merata dan menempatkan Aceh dalam kategori ketimpangan rendah (porsi  $>17\%$ ). Sebaliknya, kelompok 20 persen penduduk teratas mengalami sedikit penurunan porsi pengeluaran dari 40,05 persen menjadi 39,95 persen, menunjukkan adanya pergeseran kecil pendapatan ke kelompok menengah dan bawah.

Kombinasi kedua indikator ini (Gini Ratio dan Kriteria Bank Dunia) memperlihatkan arah yang konsisten: ketimpangan di Aceh cenderung menurun, dan pemerataan ekonomi secara bertahap membaik. Walaupun perubahannya tidak besar, arah penurunan yang stabil selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa proses pemerataan tidak bersifat temporer, melainkan berakar pada kebijakan sosial-ekonomi yang berkesinambungan (Maranzano et al., 2022).

Dari sisi kemiskinan, data menunjukkan tren positif. Jumlah penduduk miskin menurun dari 0,834 juta menjadi 0,811 juta jiwa, atau turun sekitar 23 ribu orang dalam tiga tahun. Persentase kemiskinan juga turun dari 14,64 persen menjadi 14,23 persen, mendukung kesimpulan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat bawah turut berkontribusi terhadap penurunan ketimpangan. Namun, meskipun penurunan ini menggembirakan, tingkat kemiskinan Aceh masih tergolong tinggi dibandingkan rata-rata nasional (sekitar 9,4 persen pada periode yang sama), menandakan bahwa tantangan struktural tetap ada, terutama di wilayah pedesaan terpencil dan daerah pascakonflik.

Dari sisi kemiskinan, data menunjukkan tren positif. Jumlah penduduk miskin menurun dari 0,834 juta menjadi 0,811 juta jiwa, atau turun sekitar 23 ribu orang dalam tiga tahun. Persentase kemiskinan juga turun dari 14,64 persen menjadi 14,23 persen, mendukung kesimpulan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat bawah turut berkontribusi terhadap penurunan ketimpangan. Namun, meskipun penurunan ini menggembirakan, tingkat kemiskinan Aceh masih tergolong tinggi dibandingkan rata-rata nasional (sekitar 9,4 persen pada periode yang sama), menandakan bahwa tantangan struktural tetap ada, terutama di wilayah pedesaan terpencil dan daerah pascakonflik.

Temuan ini konsisten dengan analisis (Yusuf & Sumner, 2015) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tidak serta merta menurunkan kemiskinan, terutama ketika kebijakan harga pangan dan struktur pekerjaan informal tidak berpihak pada kelompok berpendapatan rendah. Mereka menemukan bahwa pada awal pemerintahan Jokowi, meskipun ekonomi tumbuh sekitar lima persen, tingkat kemiskinan justru meningkat sementara akibat

kenaikan harga beras dan lemahnya perlindungan sosial terhadap rumah tangga miskin. Dengan demikian, pertumbuhan makro yang tidak diiringi pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi akan menghasilkan penurunan kemiskinan yang bersifat parsial dan tidak inklusif.

Pandangan tersebut sejalan dengan argument Ravallion (2014) yang menegaskan bahwa hubungan antara pertumbuhan dan kemiskinan bersifat kondisional terhadap tingkat ketimpangan awal. Dalam konteks pro-poor growth, Ravallion menjelaskan bahwa efek pertumbuhan terhadap pengurangan kemiskinan akan semakin kecil jika distribusi pendapatan awal sangat timpang, karena kelompok miskin tidak memiliki cukup aset atau peluang untuk berpartisipasi dalam proses ekonomi. Pertumbuhan yang efektif bagi masyarakat miskin harus disertai dengan redistribusi sumber daya, peningkatan produktivitas pedesaan, dan kebijakan publik yang menurunkan hambatan struktural seperti keterbatasan akses pendidikan, lahan, dan infrastruktur (Ravallion, 2014).

Dalam konteks Aceh, argumentasi Ravallion memperkuat pandangan bahwa penurunan kemiskinan harus dilihat sebagai hasil interaksi antara pertumbuhan dan pemerataan. Meskipun terjadi perbaikan pendapatan rata-rata, distribusi manfaat pertumbuhan masih belum merata antarwilayah. Daerah pedesaan yang bergantung pada sektor primer tetap rentan terhadap fluktuasi harga dan keterbatasan akses pasar, sementara kawasan perkotaan cenderung tumbuh lebih cepat tetapi tidak inklusif. Dengan demikian, kebijakan pengentasan kemiskinan di Aceh perlu menekankan inclusive and spatially balanced growth — pertumbuhan yang memampukan kelompok miskin untuk berpartisipasi secara produktif dalam ekonomi melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, teknologi, dan pasar kerja lokal.

Sementara itu, rata-rata pengeluaran per kapita meningkat dari Rp1.165.000 pada 2022 menjadi Rp1.275.000 pada 2024, atau naik sekitar 9,4 persen dalam tiga tahun. Peningkatan ini menandakan adanya perbaikan daya beli masyarakat, namun kenaikan ini juga harus dilihat dalam konteks inflasi dan harga kebutuhan pokok yang terus naik. Dengan demikian, peningkatan pengeluaran belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan riil, terutama bagi kelompok rentan di bawah garis kemiskinan.

Tabel 1 mengindikasikan tiga temuan penting. Pertama, Aceh menunjukkan arah ketimpangan yang menurun, meskipun perubahannya relatif kecil dan belum merata antarwilayah. Kedua, terjadi pola divergensi perkotaan-perdesaan, di mana ketimpangan di kota meningkat sedangkan di desa menurun, sehingga kebijakan pemerataan ke depan perlu lebih menekankan aspek *urban inclusiveness*. Ketiga, peningkatan porsi pengeluaran kelompok bawah dan penurunan kemiskinan memperlihatkan adanya pergeseran positif dalam

distribusi pendapatan, yang dapat menjadi dasar bagi pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama periode 2022–2024, Provinsi Aceh berhasil menjaga ketimpangan pendapatan pada tingkat rendah sekaligus menurunkannya secara bertahap, berkat kombinasi kebijakan sosial, intervensi fiskal, dan penguatan ekonomi perdesaan. Namun, agar pemerataan ini berkelanjutan, pemerintah daerah perlu memperluas peluang ekonomi di perkotaan, memperkuat akses pendidikan dan pelatihan kerja, serta mengembangkan sektor produktif baru yang mampu menyerap tenaga kerja dari berbagai lapisan pendapatan secara lebih inklusif.

#### ***Analisis Ketimpangan Pendapatan Antarkabupaten/Kota di Aceh***

Hasil perbandingan ketimpangan pendapatan antarwilayah menunjukkan bahwa rata-rata Gini Ratio seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh menurun dari 0,289 pada tahun 2022 menjadi sekitar 0,287 pada tahun 2024. Penurunan kecil ini menggambarkan bahwa proses pemerataan distribusi pendapatan di Aceh berlangsung secara perlahan namun konsisten. Meskipun tidak menunjukkan perubahan yang drastis, arah pergerakan ini tetap positif karena mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah mulai memberi dampak terhadap kelompok berpendapatan rendah.

Namun, penurunan tersebut tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah. Kota Banda Aceh (0,335) dan Kota Lhokseumawe (0,327) tercatat sebagai daerah dengan tingkat ketimpangan tertinggi di provinsi. Kedua kota ini merupakan pusat aktivitas ekonomi modern, pendidikan, dan jasa, yang di satu sisi mendorong pertumbuhan cepat, tetapi di sisi lain menimbulkan kesenjangan antar kelompok pekerjaan. Ketimpangan di wilayah perkotaan ini sebagian besar bersumber dari perbedaan akses terhadap lapangan kerja formal, peluang wirausaha, serta kesenjangan keterampilan antara pekerja berpendidikan tinggi dan pekerja sektor informal.

**Tabel 2.** Perbandingan Gini Ratio Antarkabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2022–2024.

No	Kabupaten/Kota	2022	2023	2024	Perubahan (2022–2024)	Kategori
1	Simeulue	0,273	0,270	0,269	↓ 0,004	Rendah
2	Aceh Singkil	0,281	0,278	0,277	↓ 0,004	Rendah
3	Aceh Selatan	0,276	0,273	0,272	↓ 0,004	Rendah
4	Aceh Tenggara	0,282	0,279	0,278	↓ 0,004	Rendah

5	Subulussalam	0,301	0,303	0,304	↑ 0,003	Sedang-Rendah
6	Aceh Singkil	0,279	0,277	0,276	↓ 0,003	Rendah
7	Aceh Barat Daya	0,289	0,286	0,283	↓ 0,006	Rendah
8	Aceh Barat	0,287	0,286	0,285	↓ 0,002	Rendah
9	Aceh Jaya	0,288	0,284	0,283	↓ 0,005	Rendah
10	Nagan Raya	0,294	0,293	0,292	↓ 0,002	Rendah
11	Aceh Besar	0,303	0,306	0,309	↑ 0,006	Sedang-Rendah
12	Banda Aceh (Kota)	0,331	0,333	0,335	↑ 0,004	Sedang
13	Sabang (Kota)	0,318	0,320	0,320	↑ 0,002	Sedang-Rendah
14	Pidie	0,283	0,281	0,279	↓ 0,004	Rendah
15	Pidie Jaya	0,284	0,282	0,281	↓ 0,003	Rendah
16	Bireuen	0,272	0,270	0,270	↓ 0,002	Rendah
17	Aceh Utara	0,270	0,269	0,268	↓ 0,002	Rendah
18	Lhokseumawe (Kota)	0,322	0,325	0,327	↑ 0,005	Sedang
19	Aceh Timur	0,283	0,282	0,281	↓ 0,002	Rendah
20	Langsa (Kota)	0,304	0,306	0,308	↑ 0,004	Sedang-Rendah
21	Aceh Tamiang	0,285	0,283	0,282	↓ 0,003	Rendah
22	Aceh Tengah	0,264	0,263	0,262	↓ 0,002	Rendah
23	Bener Meriah	0,267	0,266	0,265	↓ 0,002	Rendah

Sumber: Olahan data *Susenas* BPS Provinsi Aceh, 2022–2024.

Keterangan: Nilai Gini Ratio  $< 0,30$  = *Ketimpangan rendah*; Nilai  $0,30 – 0,40$  =

*Ketimpangan sedang* panah ( $\uparrow/\downarrow$ ) menunjukkan arah perubahan antar tahun.

Analisis perbandingan Gini Ratio antarkabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2022–2024 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan relatif rendah dan cenderung stabil di sebagian besar wilayah. Rata-rata Gini Ratio provinsi menurun tipis dari 0,289 pada tahun 2022 menjadi 0,287 pada tahun 2024, menandakan perbaikan pemerataan pendapatan meski berlangsung perlahan. Penurunan ini terutama terjadi di wilayah tengah dan barat-selatan Aceh, seperti Aceh Tengah, Bireuen, dan Nagan Raya, yang secara umum memiliki struktur ekonomi agraris dan sosial yang lebih homogen. Perekonomian berbasis komunitas serta peran

program bantuan sosial di pedesaan tampak efektif menekan ketimpangan di wilayah-wilayah ini.

Sebaliknya, kota-kota besar seperti Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Langsa menempati posisi dengan Gini Ratio tertinggi di provinsi, berkisar antara 0,327 hingga 0,335. Ketimpangan di kawasan perkotaan tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara kelompok pekerja berpendidikan tinggi di sektor formal dan masyarakat berpenghasilan rendah di sektor informal. Perkembangan sektor jasa, pendidikan, dan digitalisasi ekonomi di kota memang meningkatkan produktivitas, tetapi belum inklusif bagi seluruh kelompok sosial. Hal ini memperlihatkan adanya dinamika ganda: kemajuan ekonomi perkotaan yang cepat, namun tidak sepenuhnya disertai pemerataan hasil pembangunan.

Secara spasial, perbedaan Gini Ratio antarwilayah menggambarkan ketidakseimbangan struktural dalam distribusi aktivitas ekonomi di Aceh. Wilayah pesisir timur dan utara menunjukkan ketimpangan yang lebih tinggi karena menjadi pusat pertumbuhan, sedangkan daerah pedalaman relatif lebih merata namun dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah. Kondisi ini menandakan bahwa tantangan utama Aceh bukan terletak pada kesenjangan ekstrem, melainkan pada kesenjangan spasial—yakni distribusi manfaat pembangunan yang belum seimbang antara pusat ekonomi dan wilayah hinterland. Dengan demikian, strategi ke depan perlu menitikberatkan pada integrasi ekonomi antarwilayah dan penguatan sektor produktif perdesaan agar pertumbuhan lebih inklusif dan berkeadilan.

#### **Analisis Spasial Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh (2022–2024)**

Analisis spasial terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Aceh memperlihatkan adanya variasi regional yang cukup jelas antar kabupaten/kota, baik secara geografis maupun menurut karakteristik ekonomi wilayah. Secara umum, Aceh tetap berada dalam kategori ketimpangan rendah, tetapi terdapat pola spasial yang kontras antara wilayah perkotaan di pesisir utara–timur dan wilayah agraris di tengah serta barat–selatan. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa ketimpangan di Aceh lebih banyak bersumber dari perbedaan struktur ekonomi dan tingkat urbanisasi antar daerah.

#### **Pola Ketimpangan di Wilayah Pesisir Utara dan Timur**

Wilayah pesisir utara dan timur meliputi kabupaten/kota seperti Aceh Utara, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang. Daerah ini memiliki peran penting dalam perdagangan, jasa, dan industri minyak dan gas. Namun, pola distribusi pendapatan di wilayah ini menunjukkan perbedaan antara daerah industri perkotaan dan wilayah agraris sekitarnya.

1. Kota Lhokseumawe (Gini Ratio 0,327) dan Kota Langsa (0,308) mencatat tingkat ketimpangan tertinggi di kawasan ini. Keduanya berperan sebagai pusat ekonomi regional dengan aktivitas industri, jasa, dan perdagangan yang relatif maju.
2. Sebaliknya, Aceh Utara (0,268) dan Bireuen (0,270) justru menunjukkan ketimpangan rendah, karena struktur ekonominya masih didominasi oleh sektor pertanian dan perdagangan kecil yang menyerap tenaga kerja lokal secara merata.

Secara spasial, hal ini menggambarkan kontras ekonomi perkotaan–perdesaan di koridor pesisir timur, di mana daerah urban cenderung memperlihatkan ketimpangan lebih besar akibat perbedaan upah dan produktivitas antar sektor, sementara daerah agraris menampilkan pola distribusi yang lebih egaliter.

### **Wilayah Tengah dan Dataran Tinggi (Aceh Tengah dan Bener Meriah)**

Daerah dataran tinggi Aceh seperti Aceh Tengah (0,262) dan Bener Meriah (0,265) memperlihatkan tingkat ketimpangan paling rendah di seluruh provinsi. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh homogenitas ekonomi dan sosial penduduk di wilayah tersebut. Kedua kabupaten ini mengandalkan sektor pertanian kopi arabika dan hortikultura, yang distribusi pendapatannya relatif merata di antara rumah tangga petani. Selain itu, pola permukiman yang tersebar dan minimnya aktivitas industri besar membuat perbedaan pendapatan antar kelompok sosial relatif kecil. Dari perspektif spasial, wilayah tengah Aceh membentuk zona dengan pemerataan ekonomi tertinggi, berperan sebagai “penyeimbang” bagi ketimpangan yang terjadi di kawasan perkotaan pesisir.

### **Wilayah Barat–Selatan Aceh**

Daerah barat–selatan yang meliputi Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Selatan, Simeulue, dan Aceh Barat Daya menunjukkan pola ketimpangan yang relatif merata dan stabil selama periode 2022–2024. Nilai Gini Ratio di wilayah ini berkisar antara 0,269 hingga 0,285, seluruhnya tergolong ketimpangan rendah. Ciri utama kawasan ini adalah dominasi ekonomi berbasis pertanian, perikanan, dan perkebunan rakyat. Kegiatan ekonomi berskala kecil dan keterlibatan luas masyarakat dalam sektor produktif lokal menciptakan pola distribusi pendapatan yang lebih egaliter.

1. Kabupaten Simeulue (0,269) dan Aceh Selatan (0,272) menempati posisi terendah dalam ketimpangan, menandakan pemerataan yang kuat di wilayah pesisir barat.
2. Nagan Raya (0,292) relatif sedikit lebih tinggi karena pertumbuhan sektor industri energi dan perkebunan sawit yang memunculkan disparitas antara pekerja formal dan informal.

Secara spasial, kawasan barat-selatan dapat dikategorikan sebagai zona pemerataan struktural, di mana ketimpangan cenderung menurun secara konsisten karena kontribusi ekonomi masyarakat tersebar lebih luas dan kebijakan pembangunan desa berjalan efektif.

### **Wilayah Perkotaan dan Pusat Administratif**

Kota besar seperti Banda Aceh (0,335), Sabang (0,320), dan Lhokseumawe (0,327) membentuk klaster wilayah dengan ketimpangan tertinggi di provinsi. Ketiga kota tersebut merupakan pusat administrasi, pendidikan, dan perdagangan dengan struktur ekonomi berbasis jasa dan sektor formal. Ketimpangan tinggi di kota-kota ini disebabkan oleh perbedaan akses terhadap lapangan kerja, modal usaha, serta tingkat pendidikan, yang menciptakan kesenjangan antara kelompok profesional, pegawai negeri, dan pekerja informal.

Selain itu, urbanisasi yang cepat tanpa diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat berpendapatan rendah menyebabkan ketimpangan perkotaan meningkat, sebagaimana tercermin dalam kenaikan Gini Ratio perkotaan dari 0,318 menjadi 0,325 selama tiga tahun terakhir.

Secara spasial, pola ketimpangan di Aceh membentuk gradien dari tinggi ke rendah:

1. Tinggi: Kota Banda Aceh – Lhokseumawe – Langsa
2. Sedang-rendah: Aceh Besar – Aceh Barat Daya – Nagan Raya
3. Rendah: Aceh Tengah – Bener Meriah – Aceh Utara – Bireuen – Aceh Selatan – Simeulue

Pola ini memperlihatkan adanya geografi ketimpangan yang menurun dari utara (wilayah urban dan industri) ke selatan dan tengah (wilayah agraris dan rural).

### **Implikasi Spasial terhadap Pemerataan Wilayah**

Temuan spasial ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Aceh lebih bersifat horizontal (antarwilayah) daripada vertikal (antarindividu). Dengan kata lain, perbedaan kesejahteraan antar kabupaten/kota lebih menentukan ketimpangan provinsi dibanding perbedaan dalam satu wilayah.

Kawasan perkotaan tumbuh cepat, namun belum inklusif; sementara daerah agraris tumbuh lambat tetapi lebih merata. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan wilayah Aceh perlu diarahkan pada integrasi ekonomi antar kawasan, dengan langkah-langkah seperti:

1. Menghubungkan kawasan pesisir dan pedalaman melalui infrastruktur ekonomi dan logistik.
2. Memperkuat UMKM perkotaan agar mampu menyerap tenaga kerja dari kelompok berpendapatan rendah.

3. Mendorong diversifikasi ekonomi perdesaan berbasis agroindustri agar wilayah rural tidak tertinggal dalam rantai nilai regional.

Analisis spasial ini menegaskan bahwa ketimpangan Aceh bukan disebabkan oleh kesenjangan ekstrem, melainkan oleh struktur ekonomi yang tidak seimbang antar wilayah. Pemerataan ke depan harus berbasis pendekatan spasial: memperkuat desa tanpa meninggalkan kota, dan memperluas manfaat pembangunan ke seluruh kabupaten secara lebih proporsional.

Analisis spasial ini menegaskan bahwa ketimpangan Aceh bukan disebabkan oleh kesenjangan ekstrem antarindividu, melainkan oleh struktur ekonomi yang tidak seimbang antarwilayah. Perbedaan tingkat produktivitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta konsentrasi kegiatan ekonomi di sejumlah kota besar seperti Banda Aceh dan Lhokseumawe, menyebabkan aliran pertumbuhan tidak menyebar secara merata. Pemerataan ke depan harus berbasis pendekatan spasial: memperkuat desa tanpa meninggalkan kota, serta memperluas manfaat pembangunan ke seluruh kabupaten secara lebih proporsional.

Temuan ini konsisten dengan Mustika et al. (2022) yang menunjukkan bahwa ketimpangan di wilayah pedesaan berperan kausal terhadap kemiskinan absolut, sementara di perkotaan hubungan tersebut tidak signifikan. Artinya, pemerataan di wilayah perdesaan bukan hanya berfungsi mengurangi ketimpangan, tetapi juga menurunkan tingkat kemiskinan struktural. Dengan demikian, kebijakan yang memperkuat basis ekonomi desa—melalui pertanian bernilai tambah, digitalisasi UMKM, dan penguatan pasar lokal—akan memberikan efek ganda terhadap pemerataan dan penurunan kemiskinan. Sebaliknya, di perkotaan, ketimpangan lebih dipicu oleh faktor transformasi ekonomi dan diferensiasi keahlian, bukan semata distribusi pendapatan (Mustika et al., 2022).

Dalam kerangka teoretis yang lebih luas, Stiglitz (2014) menekankan bahwa ketimpangan sering kali lahir bukan dari kemalasan pasar, melainkan dari kebijakan ekonomi yang memperkuat ketimpangan struktural antar wilayah dan kelompok sosial. Ketika pertumbuhan hanya terkonsentrasi pada pusat-pusat ekonomi, daerah lain akan tertinggal bukan karena kurang produktif, melainkan karena akses terhadap peluang, teknologi, dan infrastruktur terbatas. Gagasan Stiglitz ini relevan bagi Aceh, di mana ekspansi sektor jasa dan pendidikan tinggi di kota belum disertai dengan koneksi ekonomi yang memadai ke wilayah pedalaman.

Dengan menggabungkan pandangan Mustika et al. dan Stiglitz, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan spasial Aceh mencerminkan ketimpangan fungsional dalam sistem ekonomi daerah: kota tumbuh cepat tetapi tidak inklusif, sementara desa relatif merata tetapi berpendapatan rendah. Karena itu, arah pemerataan ke depan tidak cukup hanya melalui

redistribusi fiskal, tetapi harus berbasis pada integrasi spasial dan produktivitas wilayah, yaitu membangun hubungan saling menguatkan antara desa dan kota dalam satu sistem ekonomi regional yang lebih seimbang.

### **Dinamika dan Arah Ketimpangan**

Dinamika ketimpangan pendapatan di Provinsi Aceh selama periode 2022–2024 menunjukkan pola yang kompleks dan berlapis. Secara umum, arah ketimpangan cenderung menurun, namun dengan variasi spasial dan sektoral yang berbeda antar wilayah. Nilai Gini Ratio provinsi turun dari 0,296 menjadi 0,294, menandakan pemerataan yang berlangsung perlahan tetapi konsisten. Di balik angka agregat yang stabil ini, terdapat dinamika penting terkait perbedaan antar kabupaten, perubahan struktur ekonomi, serta transisi dari ekonomi berbasis bantuan ke ekonomi berbasis produktivitas.

### **Dinamika Umum Ketimpangan: Penurunan Moderat dan Pemerataan Gradual**

Penurunan Gini Ratio dalam tiga tahun terakhir menggambarkan pergeseran arah ekonomi Aceh menuju pemerataan pendapatan yang lebih baik, meskipun belum diikuti oleh lonjakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Dinamika ini mencerminkan kondisi “pemerataan dalam stagnasi”, di mana distribusi pendapatan membaik karena peningkatan kesejahteraan di kelompok bawah, bukan karena akselerasi pendapatan di seluruh kelompok.

Faktor utama penurunan ketimpangan berasal dari program sosial dan redistribusi fiskal, seperti Dana Otonomi Khusus (Otsus), Bantuan Sosial Tunai, dan Dana Desa. Instrumen kebijakan ini menjaga daya beli rumah tangga miskin serta menurunkan kesenjangan konsumsi dasar, terutama di daerah rural. Namun, kontribusi sektor produktif terhadap pemerataan masih terbatas; sektor industri dan jasa modern di Aceh belum sepenuhnya menjadi motor pertumbuhan yang inklusif.

### **Arah Ketimpangan Antarwilayah: Konsolidasi di Desa, Divergensi di Kota**

Analisis spasial memperlihatkan bahwa arah ketimpangan di Aceh bergerak menuju konvergensi di wilayah perdesaan dan divergensi di wilayah perkotaan.

1. Di pedesaan, arah ketimpangan menurun berkat meningkatnya aktivitas ekonomi berbasis komunitas dan akses yang lebih baik terhadap infrastruktur serta bantuan pemerintah. Ketimpangan antar rumah tangga di desa semakin kecil karena pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal cenderung inklusif.
2. Di perkotaan, arah ketimpangan cenderung meningkat. Pertumbuhan ekonomi di Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Langsa didorong oleh sektor jasa, keuangan, dan perdagangan modern, yang hanya sebagian kecil dapat diakses oleh tenaga kerja berpendidikan rendah. Proses urbanisasi yang cepat tanpa disertai penciptaan lapangan kerja produktif

bagi kelompok menengah bawah menciptakan kesenjangan baru dalam pendapatan dan peluang ekonomi.

Dari sudut pandang spasial, dinamika ini menunjukkan pola ketimpangan dua kutub (*dualistic inequality*): pemerataan berjalan baik di pedesaan, tetapi diimbangi dengan pelebaran ketimpangan di kota. Akibatnya, arah ketimpangan provinsi secara agregat terlihat stabil, padahal di dalamnya terdapat pergeseran antarwilayah yang signifikan.

### **Perubahan Struktural dan Pola Konsumsi Rumah Tangga**

Perubahan arah ketimpangan di Aceh juga dipengaruhi oleh pergeseran struktur pengeluaran rumah tangga. Selama 2022–2024, kelompok 40 persen penduduk terbawah meningkatkan proporsi pengeluarannya untuk pendidikan, kesehatan, dan makanan bergizi, menandakan perbaikan kualitas kesejahteraan dasar. Sementara itu, kelompok 20 persen penduduk teratas menunjukkan peningkatan pengeluaran pada barang tahan lama dan layanan modern.

Meskipun perbedaan pola konsumsi ini masih cukup lebar, tren pergeseran di kelompok bawah memperlihatkan adanya perbaikan inklusif dalam kemampuan ekonomi dasar, yang menjadi fondasi penting bagi penurunan ketimpangan jangka panjang.

### **Pengaruh Kebijakan Publik terhadap Dinamika Ketimpangan**

Selama tiga tahun terakhir, sejumlah kebijakan publik turut berkontribusi terhadap dinamika ketimpangan di Aceh. Kebijakan subsidi energi, bantuan pangan, dan program pemberdayaan ekonomi mikro berperan menekan ketimpangan konsumsi. Namun, arah ketimpangan ke depan akan sangat bergantung pada keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus), yang hingga 2024 masih menjadi instrumen utama pendanaan sosial dan infrastruktur di daerah.

Tanpa transformasi struktural menuju produktivitas sektor riil, kebijakan berbasis transfer hanya memberikan efek sementara. Karena itu, arah jangka menengah perlu difokuskan pada transformasi ketimpangan dari redistributif menuju produktif, yakni dengan memperluas kesempatan kerja dan investasi di sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja menengah bawah.

### **Arah Ketimpangan Jangka Panjang: Menuju Inklusivitas atau Stagnasi?**

Dari perspektif jangka panjang, dinamika ketimpangan Aceh memperlihatkan dua kemungkinan arah:

1. Arah Inklusif (*Inclusive Growth*) – jika kebijakan pembangunan berhasil mengintegrasikan desa dan kota dalam rantai nilai ekonomi regional, serta memperkuat peran UMKM dan inovasi digital yang inklusif.

2. Arah Stagnasi (*Redistributive Equilibrium*) – jika pemerataan hanya ditopang oleh kebijakan sosial tanpa peningkatan produktivitas sektor riil. Dalam skenario ini, Gini Ratio akan tetap rendah, tetapi pertumbuhan ekonomi tidak akan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dinamika ketimpangan di Aceh memperlihatkan pola yang menurun secara moderat dengan perbedaan arah antarwilayah. Pemerataan di pedesaan menjadi pendorong utama penurunan Gini Ratio, sedangkan peningkatan ketimpangan di kota perlu menjadi perhatian serius. Arah ketimpangan ke depan akan sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan pembangunan mampu beralih dari pendekatan kompensatoris menuju pendekatan produktif, yaitu dari redistribusi pendapatan menuju penciptaan kesejahteraan berbasis pertumbuhan inklusif.

### **Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Aceh selama periode 2022–2024 cenderung menurun dengan laju yang moderat. Nilai Gini Ratio yang turun dari 0,296 menjadi 0,294 menggambarkan arah pemerataan yang positif, meskipun perubahannya masih sangat kecil. Artinya, Aceh mengalami proses pemerataan yang lebih bersifat redistributif ketimbang pertumbuhan inklusif, karena sumber utama penurunan ketimpangan masih berasal dari kebijakan sosial dan transfer fiskal, bukan peningkatan kinerja sektor riil.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, fenomena ini dapat dijelaskan melalui kerangka Kuznets Curve (Maranzano et al., 2022; Wang et al., 2023) — yang menyatakan bahwa ketimpangan akan meningkat pada tahap awal pembangunan, kemudian menurun setelah ekonomi mencapai kematangan struktural. Namun, posisi Aceh tampak berbeda: ketimpangan di provinsi ini sudah rendah meskipun pertumbuhan ekonominya masih terbatas. Dengan kata lain, Aceh belum melalui fase “naik-turun” seperti pola klasik Kuznets, melainkan mengalami kondisi low inequality with low growth. Rendahnya ketimpangan di Aceh tidak berarti tingginya kemakmuran, melainkan cerminan dari struktur ekonomi yang masih homogen dengan dominasi sektor pertanian, jasa sosial, dan pemerintahan.

Jika ditelaah lebih jauh, penurunan ketimpangan di Aceh lebih banyak terjadi di wilayah pedesaan, sementara di wilayah perkotaan justru meningkat. Hal ini menunjukkan dualitas arah ketimpangan yang mengindikasikan terjadinya divergensi ekonomi antarwilayah. Perkotaan seperti Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Langsa mengalami ekspansi sektor jasa, pendidikan, dan keuangan, tetapi pertumbuhan tersebut belum inklusif. Kelompok pekerja berpendidikan tinggi menikmati peningkatan pendapatan yang lebih cepat dibandingkan pekerja informal,

sehingga menciptakan kesenjangan baru. Sebaliknya, wilayah perdesaan justru menunjukkan perbaikan distribusi pendapatan berkat program sosial dan penguatan ekonomi berbasis komunitas.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Sulistyaningrum dan Tjahjadi (2022) yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia secara nasional lebih tinggi di wilayah perkotaan dibandingkan perdesaan. Dengan menggunakan dekomposisi indeks Theil dan analisis kuantil, mereka menemukan bahwa pendidikan dan lokasi geografis merupakan dua faktor utama yang memperkuat ketimpangan, di mana pekerja berpendidikan rendah dan mereka yang tinggal di kota memiliki distribusi pendapatan yang lebih timpang. Namun, berbeda dengan Aceh yang menunjukkan kecenderungan divergensi antara desa dan kota, studi nasional tersebut menemukan bahwa kesenjangan urban–rural secara agregat cenderung menurun seiring waktu, menunjukkan proses konvergensi pendapatan antar wilayah di tingkat nasional (Sulistyaningrum & Tjahjadi, 2022).

Dengan demikian, ketimpangan di Aceh memperlihatkan pola khusus yang belum sepenuhnya mengikuti tren nasional. Pemerataan di pedesaan Aceh relatif lebih cepat, tetapi ketimpangan perkotaan justru meningkat karena konsentrasi ekonomi di sektor jasa modern belum disertai pemerataan kesempatan kerja dan pendidikan.

Kondisi ini memperkuat temuan berbagai studi empiris di Indonesia bahwa redistribusi fiskal dan program sosial lebih efektif di daerah agraris, di mana struktur pendapatan relatif seragam dan ketimpangan vertikal kecil. Aceh merupakan contoh nyata bagaimana Dana Desa, BLT, dan Dana Otonomi Khusus berperan besar dalam menjaga pemerataan di tingkat rumah tangga. Namun, dari sisi keberlanjutan, model pemerataan berbasis bantuan sosial memiliki keterbatasan, masih mampu menjaga keseimbangan jangka pendek, tetapi tidak secara langsung mendorong peningkatan produktivitas dan nilai tambah.

Dari sisi spasial, analisis antar kabupaten/kota memperlihatkan adanya pola ketimpangan yang tersegmentasi. Kabupaten agraris seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Aceh Utara memiliki Gini Ratio terendah, sedangkan kota-kota dengan aktivitas ekonomi modern seperti Banda Aceh dan Lhokseumawe mencatat Gini Ratio tertinggi. Pola ini menunjukkan adanya ketimpangan horizontal antarwilayah yang bersumber dari perbedaan struktur ekonomi dan tingkat urbanisasi. Artinya, ketimpangan Aceh tidak hanya bersifat vertikal (antara kaya dan miskin), tetapi juga geografis (antara kota dan desa). Oleh karena itu, kebijakan pemerataan ke depan tidak cukup dengan intervensi sosial, tetapi juga memerlukan integrasi ekonomi wilayah melalui koneksi, infrastruktur, dan rantai nilai antar sektor.

Dalam konteks teori pertumbuhan inklusif (*inclusive growth*), arah pembangunan Aceh masih berada pada tahap awal. Pemerataan pendapatan sudah relatif baik, tetapi belum dibarengi oleh penciptaan kesempatan ekonomi baru yang cukup luas. Pertumbuhan inklusif menuntut dua hal utama: produktivitas yang meningkat dan partisipasi yang merata. Di Aceh, produktivitas masih terkonsentrasi pada sektor publik dan sebagian kecil sektor jasa perkotaan, sementara partisipasi ekonomi masyarakat pedesaan masih terbatas pada kegiatan dengan nilai tambah rendah. Oleh karena itu, tantangan ke depan bukan sekadar menjaga ketimpangan tetap rendah, tetapi membangun pertumbuhan yang inklusif melalui peningkatan kapasitas produksi dan keterampilan tenaga kerja lokal.

Selain itu, transisi ekonomi global menuju digitalisasi juga membawa dimensi baru terhadap ketimpangan. Di wilayah perkotaan Aceh, muncul bentuk ketimpangan digital, yaitu perbedaan kemampuan dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi untuk kegiatan ekonomi. Pekerja muda dengan literasi digital tinggi mulai memperoleh keunggulan kompetitif, sementara kelompok yang tertinggal dari sisi teknologi menghadapi risiko marginalisasi ekonomi. Jika tidak diantisipasi, ketimpangan digital ini dapat menjadi faktor pendorong baru bagi ketimpangan pendapatan di masa depan, terutama di kota-kota besar Aceh.

Sejalan dengan pandangan Joseph E. Stiglitz (2012), bentuk ketimpangan seperti ini merupakan perpanjangan dari ketimpangan struktural yang diciptakan oleh sistem ekonomi modern. Dalam analisisnya, Stiglitz menegaskan bahwa transformasi teknologi dan globalisasi seharusnya menjadi alat demokratisasi ekonomi, tetapi dalam praktiknya sering memperbesar jurang antara mereka yang memiliki akses terhadap informasi, pendidikan, dan modal dengan mereka yang tidak. Teknologi menciptakan “*winner-takes-most economy*”, di mana keuntungan ekonomi terakumulasi pada kelompok kecil yang mampu menguasai inovasi dan jaringan digital, sementara mayoritas tenaga kerja menghadapi penurunan nilai keterampilan dan daya tawar (Stiglitz, 2012).

Konteks Aceh mencerminkan dinamika yang sama dalam skala lokal: digital divide tidak hanya menciptakan kesenjangan antara kota dan desa, tetapi juga di dalam kota itu sendiri, antara pekerja formal yang terhubung dengan ekosistem digital dan kelompok informal yang bergantung pada ekonomi tradisional. Stiglitz menekankan bahwa tanpa kebijakan publik yang progresif, pasar tidak akan secara otomatis memperbaiki ketimpangan tersebut. Pemerintah perlu berperan aktif melalui investasi dalam pendidikan digital, infrastruktur teknologi, serta sistem pajak dan upah yang adil agar manfaat teknologi tidak hanya menguntungkan segelintir pihak (Stiglitz, 2014).

Dengan demikian, tantangan digitalisasi di Aceh tidak hanya terletak pada kesiapan teknologi, tetapi juga pada kemampuan negara dan masyarakat untuk memastikan pemerataan akses terhadap peluang digital. Tanpa intervensi kebijakan yang berpihak pada kelompok tertinggal, digitalisasi dapat menjadi “wajah baru” dari ketimpangan — sebagaimana diingatkan Stiglitz — di mana inovasi yang seharusnya memperluas kesejahteraan justru memperdalam jurang sosial-ekonomi antar kelompok masyarakat.

Penurunan ketimpangan di Aceh selama 2022–2024 lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan redistribusi daripada transformasi ekonomi. Pemerataan yang terjadi bersifat *consumptive equality* — kesetaraan dalam pengeluaran dasar — bukan *productive equality* yang berakar pada peningkatan produktivitas dan kesempatan kerja. Agar arah ketimpangan ke depan benar-benar menuju kesejahteraan yang inklusif, Aceh perlu memperkuat fondasi strukturalnya: mendorong industrialisasi berbasis sumber daya lokal, memperluas akses ke pendidikan dan teknologi, serta memastikan pembangunan kota dan desa berjalan secara terpadu.

Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan Aceh harus beralih dari pendekatan bantuan ke pendekatan penciptaan nilai tambah, dari redistribusi pasif menuju pemberdayaan produktif. Jika transformasi ini berhasil dilakukan, maka pemerataan yang telah tercapai dapat menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, bukan sekadar keseimbangan sementara yang rentan terhadap perubahan fiskal.

#### 4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Ketimpangan pendapatan di Aceh periode 2022–2024 menunjukkan tren menurun, dengan Gini ratio dari 0,296 menjadi 0,294. Penurunan ini terutama terjadi di wilayah pedesaan, sejalan dengan penguatan ekonomi lokal dan program sosial. Sebaliknya, ketimpangan di perkotaan cenderung meningkat akibat transformasi ekonomi ke sektor jasa dan digital yang belum inklusif.

Pola spasial menunjukkan ketidakseimbangan struktur ekonomi antarwilayah, bukan kesenjangan ekstrem antarindividu. Daerah agraris seperti Aceh Tengah dan Bireuen relatif lebih merata, sedangkan kota besar mengalami konsentrasi pendapatan. Meskipun tingkat kemiskinan menurun menjadi 14,23 persen, angka tersebut masih lebih tinggi dari rata-rata nasional, menandakan tantangan struktural yang berkelanjutan. Secara umum, Aceh berada pada fase pertumbuhan yang stabil namun belum inklusif sepenuhnya.

## Rekomendasi Kebijakan

1. Perkuat pemerataan spasial melalui konektivitas desa–kota dan pemerataan infrastruktur ekonomi.
2. Dorong pertumbuhan pro-rakyat miskin dengan memperluas akses modal, pelatihan, dan lapangan kerja produktif.
3. Optimalkan dana publik untuk kegiatan ekonomi produktif berbasis komunitas.
4. Bangun ekonomi digital inklusif dengan literasi teknologi dan dukungan bagi UMKM daring.
5. Tingkatkan kualitas SDM lewat pendidikan vokasional dan pemerataan akses pendidikan.
6. Kembangkan basis data spasial kemiskinan guna memperkuat perencanaan berbasis bukti.

## REFERENSI

- Aisyah, H., Dahlan, M. D., & Aprila, M. (2023). *Pengaruh Hubungan Antara Ketimpangan Pendapatan, Pengurangan Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebuah Perspektif dari Indonesia*. *JURNAL ECONOMINA*, 2(12), 3722–3736. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i12.1065>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2024). *Profil kemiskinan Provinsi Aceh tahun 2024*. Banda Aceh: BPS Provinsi Aceh.
- Badan Pusat Statistik. (2022–2024). *Data Susenas: Survei Sosial Ekonomi Nasional*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. Jakarta: BPS RI.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Gini ratio menurut provinsi, 2020–2024*. Jakarta: BPS RI.
- Bank Dunia. (2023). *World development indicators: Inequality and shared prosperity*. Washington, D.C.: The World Bank.
- Isard, W., Azis, I. J., Drennan, M. P., Miller, R. E., Saltzman, S., & Thorbecke, E. (2017). *Methods of interregional and regional analysis*. Taylor & Francis. <https://doi.org/10.4324/9781315249056>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan keuangan pemerintah pusat dan dana transfer ke daerah*. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Maranzano, P., Bento, J. P. C., & Manera, M. (2022). The Role of Education and Income Inequality on Environmental Quality: A Panel Data Analysis of the EKC Hypothesis on OECD Countries. *Sustainability (Switzerland)*, 14(3). <https://doi.org/10.3390/su14031622>

Muftiyatul Azizah. (2022). *Analysis of the Effect of the Gini Ratio, Percentage of Poor Population, GRDP, HDI, and Average Per Capita Expenditures on Development Inclusivity Index in Java Island*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(02). <https://doi.org/10.22219/jep.v21i02.20306>

Mustika, C., Haryadi, H., Junaidi, J., & Zamzami, Z. (2022). The Relationship Between Absolute Poverty Income Inequality in Rural and Urban Areas in Indonesia: The Granger Causality Approach. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(2). <https://doi.org/10.23960/jep.v11i2.541>

OECD. (2022). *Income inequality and inclusive growth: Policy lessons for developing economies*. Paris: OECD Publishing.

Ravallion, M. (2014). Income inequality in the developing world. *Science*, 344(6186), 851–855. <https://doi.org/10.1126/science.1251875>

Stiglitz, J. E. (2012). *Sustainable Humanity, Sustainable Nature: Our Responsibility — The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*. New York, NY: W. W. Norton & Company. <http://www.nytimes.com/2014/05/09/opinion/what-housing-recovery.html?ref=>

Sulistyaningrum, E., & Tjahjadi, A. M. (2022). Income Inequality in Indonesia: Which Aspects Cause the Most? *Journal of Indonesian Economy and Business*, 37(3). <https://doi.org/10.22146/jieb.v37i3.2015>

UNDP. (2023). *Human development report 2023/2024: Breaking the gridlock – Reimagining cooperation in a polarized world*. New York: United Nations Development Programme. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4934148>

Wang, Q., Yang, T., & Li, R. (2023). Does income inequality reshape the environmental Kuznets curve (EKC) hypothesis? A nonlinear panel data analysis. *Environmental Research*, 216. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.114575>

World Bank. (2022). *Indonesia economic prospects: Boosting recovery and building resilience*. Washington, D.C.: The World Bank.

Yusuf, A. A., & Sumner, A. (2015). Growth, Poverty and Inequality under Jokowi. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(3). <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1110685>